

Mengukur efektifitas program pengendalian inflasi pada hari besar keagamaan (idul fitri, natal dan tahun baru) di kota tegal

Tulus¹, Abdul Aziz Ahmad², Suharno³

^{1,2,3}Faculty of Economic And Bisnis, University Of Jenderal Soedirman

¹Email: tulus06@bi.go.id

²Email: rekan.Aziz@gmail.com

³Email: suharno@unsoed.ac.id

Abstrak

Dapat dipahami, bahwa setiap menjelang hari besar keagamaan terjadi kenaikan harga barang dan jasa hampir diseluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Tegal. Upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dilakukan tidak lebih sebagai kegiatan rutin sehingga seringkali tidak efektif dalam mencapai sasaran pengendalian inflasi yang diharapkan. Sebagai bagian manajemen risiko pengendalian inflasi di Kota Tegal, maka perlu dilakukan inventarisir komoditas-komoditas apa saja yang berkontribusi baik secara frekuensi maupun andil mempengaruhi inflasi di Kota Tegal dalam setiap momentum hari besar keagamaan nasional, sehingga penanganan inflasi yang dilakukan lebih efektif dan terukur. Penulis mengambil data inflasi pada momentum hari besar keagamaan Idul Fitri, Natal dan Tahun baru 4 (empat) tahun dari tahun 2015-2018 yang diolah secara sederhana menggunakan program microsoft excel dan dipetakan melalui 4 (empat) kuadran yaitu kuadran I, II, III, dan IV yang menunjukkan frekuensi dan andil 10 (sepuluh) komoditas yang sering muncul dalam inflasi di moment idul fitri. Selanjutnya dipilih prioritas komoditas paling besar frekuensi dan andil yang terdapat di kuadran I untuk dilakukan treatment melalui perumusan strategis hal-hal yang perlu dilakukan.

Kata Kunci: Inflasi; pengendalian inflasi; komoditas; tpid

Measuring the effectiveness of inflation control programs on religious holidays (eid al-fitr, christmas and new year) in the city of tegal

Abstract

It is understandable, that every time before the religious holiday there is an increase in prices of goods and services in almost all regions in Indonesia, including in the City of Tegal. Regional inflation control efforts were undertaken by the Regional Inflation Control Team (TPID) carried out are no more than routine activities so that they are often ineffective in achieving the expected inflation control targets. As part of inflation control risk management in Tegal City, it is necessary to carry out an inventory of commodities which contribute both frequency and contribution to inflation in Tegal City in every national religious holiday momentum, so that the handling of inflation is carried out more effectively and measured. The author takes inflation data on the momentum of the religious holiday's Eid, Christmas and New Year 4 (four) years from 2015-2018 which is processed simply using the Microsoft Excel program and mapped through 4 (four) consciousness, namely quadrants I, II, III, and IV, which shows the frequency and share of 10 (ten) commodities that often appear in inflation at the Eid moment. Then the priority of commodities with the highest frequency and share contained in quadrant I am selected for treatment through the strategic formulation of things that need to be done.

Keywords: Inflation; controlling inflation; commodity; tpid

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat dilihat sebagai cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi dan program ekonomi yang dilakukan oleh kepala daerah. Untuk itu, pengelolaan inflasi di daerah menjadi sangat penting sebagai cerminan kondisi ekonomi daerah, bagaimana kegiatan ekonomi dan dunia usaha berjalan, bagaimana pola distribusi dan perdagangan, konsumsi masyarakat, investasi, dan pemerintahan dijalankan.

Inflasi dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekspektasi. Masing-masing faktor secara individual maupun bersama-sama dapat mempengaruhi inflasi secara berbeda dalam periode tertentu. Pengendalian Inflasi di Indonesia menghadapi tantangan struktural dan dipengaruhi karakteristik daerah sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Kota Tegal menjadi salah satu kota yang dihitung inflasinya berdasarkan survey biaya hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari 90 kota di seluruh Indonesia yang terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 56 kabupaten/kota dengan jumlah 859 paket komoditas (www.bps.go.id).

Upaya pengendalian inflasi di daerah saat ini telah ditransformasikan kepada Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dengan pelaksana tugas harian dikerjakan oleh Sekretaris Daerah sesuai kepres No 33 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional . Tahun 2018 telah terbentuk 532 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota.

Tabel 1. Perkembangan jumlah tpid

Tahun	Jumlah TPID
2010	38
2011	64
2012	86
2013	183
2014	396
2015	442
2016	507
2017	524
2018	532

Program pengendalian inflasi daerah menjadi perhatian penting Pemerintah Pusat, Bank Indonesia sebagai bank central yang memiliki tujuan mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang digambarkan dalam inflasi (harga barang/jasa) dan nilai tukar (kurs) dalam pelaksanaan tugas utama bank central sebagaimana amanat undang-undang dasar Republik Indonesia (UUD tahun 1945 pasal 23D) dan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali.

Perlu dipahami, bahwa Bank Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam mengendalikan inflasi, Bank Indonesia hanya dapat mempengaruhi dari sisi permintaan terkait dengan kebijakan moneter dan system pembayaran, sementara peran pengendalian inflasi lainnya lebih banyak di sisi fiskal yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sehingga menjadi penting, bagaimana pemerintah melakukan manajemen risiko terhadap tekanan inflasi khususnya di daerah. Dalam Kepres No 33 Tahun 2017 Tentang TPID, disebutkan tugas-tugas TPID antara lain:

melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/ kota;

menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat kabupaten/ kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;

melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/ kota

melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau

melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

Hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi adalah komoditas-komoditas yang memiliki volatilitas, andil yang tinggi, frekuensi sering muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi, tergantung dengan ketersediaan pasokan terutama komoditas yang menghadapi tantangan dan kendala factor musim/cuaca, serta instrument kebijakan yang ditempuh.

Pada hari besar keagamaan nasional Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, inflasi di Kota Tegal lebih banyak dipengaruhi oleh komoditas *volatile food* dan *administered price*. Persistensi komoditas penyumbang inflasi pada periode puasa 4 tahun terakhir (2015-2018) daging ayam ras (0,06), telur ayam ras dg andil 0,07, beras (0,18) dan bawang merah (0,03). Sementara, pada periode lebaran dipengaruhi oleh komoditas angkutan dalam kota (0,14), daging ayam ras (0,12), angkutan antar kota (0,14) dan bawang merah (0,08). Sehingga dapat dipahami, bahwa setiap menjelang hari besar keagamaan nasional selalu saja terjadi kenaikan harga barang dan jasa hampir diseluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Tegal. Hari besar keagamaan nasional telah menjadi hari-hari yang dirayakan di Indonesia, timbul budaya mudik atau pulang kampung. Budaya silaturahmi, disadari atau tidak telah membawa dampak pada tingkat konsumsi dan pembentukan harga barang/jasa di masyarakat. Distribusi orang dan barang juga mengalami pergerakan harga tiket maupun transportasi. Mitigasi risiko pengendalian inflasi harus mampu menangkap potensi risiko inflasi di daerah yang dipicu tingkat konsumsi yang meningkat pada periode ini. Sehingga melalui roadmap pengendalian inflasi TPID Kota Tegal dapat diarahkan langkah strategis yang tepat sehingga inflasi Kota Tegal dapat terjaga rendah dan stabil.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian inflasi Nasional telah mengeluarkan surat No. EK.2.1/85/M.EKON/04/2019 pada tanggal 8 April 2019 perihal Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2019 dan EK.2.1-322/M.EKON/12/2019 pada tanggal 13 Desember 2019 perihal Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Hari Libur Natal dan Tahun Baru tahun 2019. Harapannya, inflasi pada hari besar keagamaan tahun 2019 dapat terkendali. Sehingga diperlukan upaya pengendalian yang dapat diukur hasilnya.

Secara bertahap inflasi di Kota Tegal dapat searah dengan sasaran inflasi nasional meskipun berfluktuasi, namun arahnya sudah baik seperti yang terlihat dalam table inflasi kota Tegal.

Tabel 2. Inflasi Enam Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2018

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cilacap	-	-	-	-	8.19	2.63	2.77	5.07	3.01
Kudus	-	-	-	-	8.59	3.28	2.32	4.21	2.61
Purwokerto	6.04	3.40	4.73	8.50	7.09	2.52	2.42	5.24	2.82
Semarang	7.11	2.87	4.85	8.19	8.53	2.56	2.32	3.45	2.39
Surakarta	6.65	1.93	2.87	8.32	8.01	2.56	2.15	4.50	2.54
Tegal	6.73	2.58	3.09	5.80	7.40	3.95	2.71	4.46	3.05
Jawa Tengah	6.88	2.68	4.24	7.99	8.22	2.73	2.36	4.40	2.62

Setiap tahun pemerintah menetapkan kebijakan makro ekonomi termasuk inflasi di tahun 2019 yang tertuang dalam Undang-undang No 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id). Bank Indonesia telah merubah strategi pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter untuk mengelola inflasi melalui flexible Inflation Targeting Framework (www.bi.go.id) yaitu bauran kebijakan dengan menjaga keseimbangan internal dan eksternal sehingga inflasi dapat terjaga. Sasaran inflasi diumumkan kepada publik baik oleh pemerintah pusat maupun Bank Indonesia. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Pemerintah pusat tentunya mengarahkan kebijakan searah dengan kebijakan makro pemerintah pusat termasuk dalam hal mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan. Untuk menjaga inflasi searah dengan kebijakan di atas, pemerintah daerah perlu memaksimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID berperan merumuskan kebijakan strategis dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi di tingkat daerah sehingga kinerja perekonomian dapat berjalan dengan baik. TPID

beranggotakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki dan menyelesaikan target kinerja masing-masing, sehingga untuk melakukan koordinasi pengendalian inflasi secara bersama-sama masih menghadapi ego sektoral, namun akan lebih mudah jika terjadi sinergitas antar OPD yang dirancang melalui rencana strategis masing-masing dinas/SKPD.

Tinjauan pustaka

Pergerakan harga barang dan jasa menjadi hal yang biasa dalam perekonomian. Perubahan harga komoditas banyak dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga sesaat tidak serta merta menimbulkan dampak pada inflasi.

Perubahan harga yang cenderung meningkat atas komoditas barang dan jasa secara umum dan terus menerus disebut sebagai inflasi (Suseno dan Astiyah-2019).

Inflasi merupakan indikator ekonomi yang sangat penting dan membawa dampak secara langsung bagi masyarakat. Presiden Amerika Serikat Gerald Ford menyebutnya sebagai musuh utama masyarakat “*Inflation is the number one public enemy*”

Tingkat inflasi lebih banyak diukur menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK). IHK dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran sesuai *The Classification of Individual consumption by purpose* (COICOP) (Badan Pusat Statistik-2015). Meskipun demikian, indeks harga produsen dan indeks harga perdagangan besar juga sering dipergunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Penghitungan inflasi dapat dilakukan secara bulanan (*month to month*), triwulanan (*quarter to quarter*), maupun tahunan (*year on year*).

Secara garis besar teori inflasi dikelompokkan menjadi 2 (dua) paham, yaitu moneterisme dan non moneterisme. Paham moneterisme dikenal dengan *classical theory on* inflasi menyebutkan bahwa penawaran uang dan jumlah uang yang beredar memiliki keterkaitan dengan perubahan tingkat harga. Perubahan peredaran uang akan mendorong perubahan tingkat harga bergerak ke atas atau sebaliknya. Teori ini juga dikenal dengan teori kuantitas uang (Mankiw-2012).

Sedangkan teori Non Moneterisme dikelompokkan dalam *structuralist theory* dan *post keynesian theory*. Teori strukturalis mempercayai inflasi terjadi karena ketidakseimbangan perekonomian. Sementara teori Keynes menjelaskan kuantitas uang bukan satu-satunya penentu tingkat harga, karena inflasi dapat terjadi meskipun tingkat kuantitas uang tidak berubah. Keynesians berpendapat bahwa inflasi terjadi pada saat permintaan total barang/jasa melebihi total penawaran pada kondisi *full employment* atau melebihi output potensialnya.

Komponen inflasi

Secara umum, inflasi dikelompokkan berdasarkan karakteristik atau sifat perubahan harga kelompok komoditas. Komponen inflasi dibagi menjadi dua yaitu inflasi inti dan inflasi non inti yang disebut disgregasi inflasi. Inflasi inti disebut sebagai *underlying inflation*, yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral. Komponen inflasi inti cenderung tetap atau persisten, dipengaruhi oleh *factor fundamental* antara lain permintaan-penawaran, kondisi lingkungan eksternal seperti nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, dan ekspektasi dari pelaku usaha dan masyarakat.

Sedangkan Inflasi non inti merupakan komponen inflasi yang volatilitasnya tinggi karena dipengaruhi *factor non fundamental*. Komponen inflasi ini banyak dipengaruhi gangguan dari penawaran dan diluar kendali bank sentral karena bersifat sesaat. Okun (1970) dan Fleming (1976), dalam tjahjono et.all (2000) menyebut sebagai komponen perubahan relative, akibat dari gangguan sisi supply. Inflasi non inti dipisahkan menjadi dua bagian yaitu inflasi komponen bergejolak (*volatile food*) yang dipengaruhi kejutan (*shocks*) kelompok bahan makanan seperti musim panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas pangan dalam negeri dan internasional, dan inflasi komponen harga yang ditetapkan pemerintah (*administered price*) yang dipengaruhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah seperti tarif tenaga listrik, harga bahan bakar minyak/gas, tarif angkutan, dan yang lainnya. Kajian tentang Persistensi inflasi-komoditas penyumbang inflasi menjadi kajian berbagai wilayah, rantai pasok, dan distribusi komoditas menjadi perhatian banyak pihak namun belum mampu secara spesifik memitigasi risiko inflasi sehingga mampu melihat efektifitas pendekatan pengendalian inflasi yang efektif. Penyusunan roadmap pengendalian inflasi dapat menjadi acuan dalam program pengendalian

inflasi namun penting menentukan sasaran komoditas yang perlu dilakukan penanganan dengan program dan strategi yang tepat, dan pendekatan-pendekatan yang tepat.

Penyebab inflasi

Berdasarkan teori kuantitas, sumber utama terjadinya inflasi adalah karena adanya kelebihan permintaan (*demand*) sehingga uang yang beredar di masyarakat bertambah banyak. Dalam teori ini sumber inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu *cost-push inflation* dan *demand-pull inflation*. *Cost-push inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul akibat adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai konsekuensi kenaikan biaya produksi. Apabila keadaan tersebut berlangsung cukup lama, maka akan terjadi inflasi yang disertai dengan resesi ekonomi. *Demand-pull Inflation* jenis ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi berada pada keadaan yang hampir mendekati atau pada kondisi *full-employment*. Dalam keadaan mendekati *full-employment*, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan *output*. Dalam keadaan *full-employment*, kenaikan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga saja. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan kondisi keseimbangan *output* berada di atas atau melebihi *output full-employment* maka akan menimbulkan *inflationary gap*. *Inflationary gap* inilah yang menyebabkan inflasi (Nopirin, 2009).

Dampak inflasi

Inflasi yang tidak terkontrol dengan baik akan membawa dampak pada perekonomian antara lain: Menurunkan daya beli, Menimbulkan kesenjangan sosial, Menghambat investasi, Menurunkan tabungan, Menurunkan daya saing. Inflasi dapat berdampak pada distribusi pendapatan bagi yang berpenghasilan tetap, alokasi faktor produksi karena mengejar kenaikan produksi, dan produksi nasional yaitu kenaikan produksi, disisi lain penurunan produksi jika inflasinya cenderung naik atau lebih tinggi (Nopirin, 2009). Oleh sebab itu, penting memperhatikan ambang batas inflasi yang dapat diterima sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian, kemiskinan, pengangguran, maupun kesenjangan ekonomi. Ambang batas nilai inflasi dikaitkan dengan hubungan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak linear (Fischer, 1993). Ambang batas inflasi untuk negara maju adalah 1-3%, negara-negara berkembang 11-12% seperti yang diulas oleh Khan dan Senhadji (2000), sementara untuk negara di asia nilai ambang batas inflasi sebesar 5,45 (vanayagathan, 2013).

Metodologi

Inflasi di Indonesia memiliki kecenderungan bergejolak dipengaruhi sisi *supply* karena gangguan produksi, distribusi dan kebijakan pemerintah (Ridwan et al, 2013). Kendala struktural di sektor riil menyebabkan fluktuasi harga bergejolak sebagaimana disampaikan dalam pidato Gubernur Bank Indonesia di Rakornas VI TPID 2015 yaitu:

Kapasitas produksi komoditas strategis yang terbatas karena terbatasnya luas lahan dan rendahnya produktivitas;

Gejolak nilai tukar yang dipengaruhi kondisi eksternal terutama ketergantungan pada ekspor komoditas sumber daya alam;

Gangguan pasokan komoditas pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim yang sulit diprediksi.

Ketergantuan energi nasional terhadap impor BBM dan LPG;

Rantai distribusi yang Panjang dan dikuasai oleh sedikit/sekelompok pelaku ekonomi menyebabkan pasar tidak efisien; dan

Terbatasnya konektivitas antar daerah, terutama infrastruktur yang mendukung distribusi dan system logistic.

Mengingat pentingnya pengendalian inflasi melalui koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, maka sejak tahun 2008 mulai dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Hal tersebut semata-mata karena pengendalian inflasi daerah memegang peranan penting untuk mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil searah sasaran yang ditetapkan.

TPID memiliki tugas antara lain (G.A Diah utari, 2015):

Menjaga dan meningkat produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian terutama kebutuhan bahan pokok masyarakat;
Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung point 1;
Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien;
Mengelola dampak penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah;
Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, stok, dan harga;
Melakukan koordinasi intensif antar Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga terkait di daerah untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pokok; dan
Sebagai wadah koordinasi pengendalian inflasi di daerah.

Melalui forum koordinasi, rapat koordinasi Pusat dengan Daerah, Rapat koordinasi wilayah, rapat koordinasi nasional TPID, dan forum yang diinisiasi TPID berbagai program strategis dirumuskan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan pengendalian inflasi di daerah dari jangka pendek sampai yang bersifat structural. Beberapa kegiatan antara lain peningkatan akses informasi harga, mendorong realisasi kerjasama antar daerah mengatasi surplus-defisit, menyelaraskan asumsi inflasi sesuai sasaran inflasi nasional. Secara umum program pengendalian inflasi dilakukan pada upaya pencapaian roadmap TPID yaitu (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif)

METODE

Pendekatan analisis

Untuk melakukan Analisa mitigasi risiko inflasi, dilakukan penelusuran fakta-fakta yang menjadi penyebab permasalahan (Heryana, 2016). Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal yang dilakukan melalui observasi langsung. Berdasarkan data komoditas penyumbang inflasi tahun 2015 -2018 di petakan komoditas penyumbang inflasi pada hari raya Idul Fitri sebagai berikut:

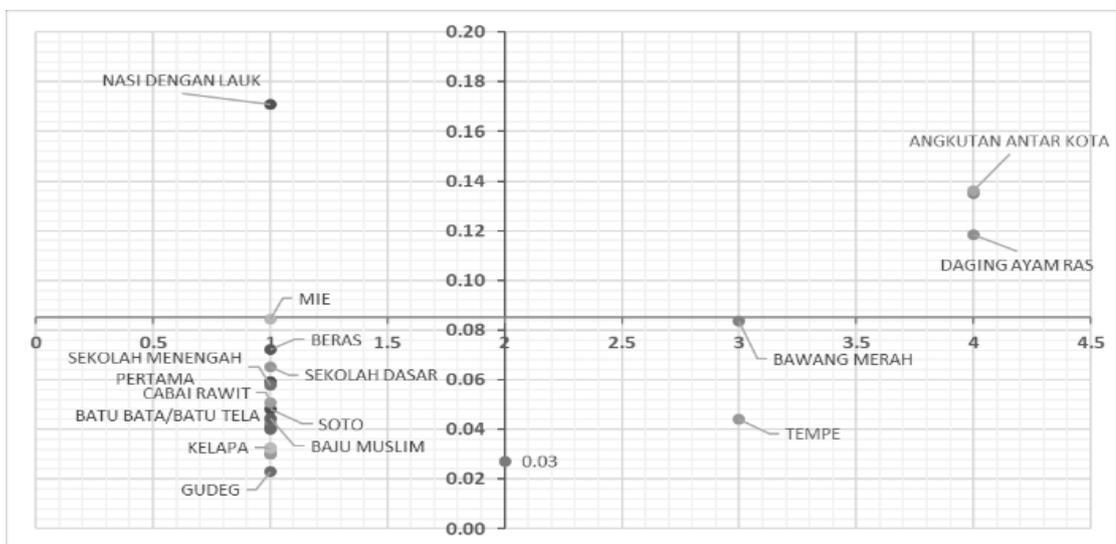
2015		2016		2017		2018	
Juli	andil	Juli	andil	Juni	andil	Juni	andil
ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.14	ANGKUTAN DALAM KOTA	0.21	TARIP LISTRIK	0.32	DAGING AYAM RAS	0.16
DAGING AYAM RAS	0.13	NASI DENGAN LAUK	0.17	ANGKUTAN DALAM KOTA	0.18	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.16
ANGKUTAN DALAM KOTA	0.09	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.17	DAGING AYAM RAS	0.11	TEMPE	0.06
BERAS	0.07	BAWANG MERAH	0.13	ANGKUTAN ANTAR KOTA	0.07	SATE	0.06
CABAI RAWIT	0.05	MIE	0.08	BAWANG MERAH	0.07	ANGKUTAN DALAM KOTA	0.05
BAJU MUSLIM	0.04	DAGING AYAM RAS	0.08	BATU BATA/BATU TELA	0.04	BAWANG MERAH	0.05
TEMPE	0.04	SEKOLAH DASAR	0.07	PISANG	0.03	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.04
DAGING KAMBING	0.03	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	0.06	TEMPE	0.03	TAHU MENTAH	0.04
KELAPA	0.03	SOTO	0.05	ROKOK KRETEK FILTER	0.03	CABAI MERAH	0.02
CABAI MERAH	0.03	SEKOLAH MENENGAH ATAS	0.04	ROKOK KRETEK	0.03	GUDEG	0.02

Gambar 1. Komoditas penyumbang inflasi pada hari raya idul fitri

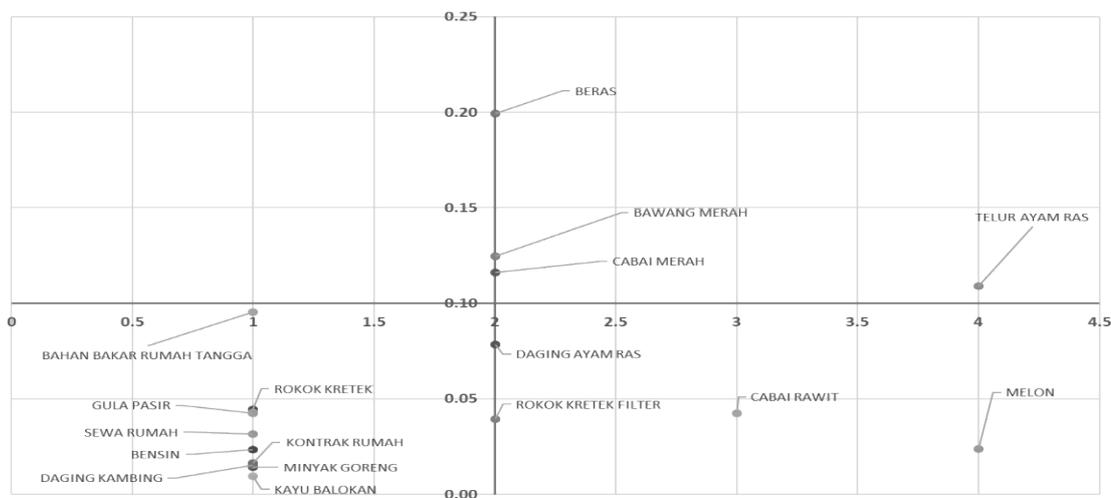
Dec-15	Andil	Dec-16	Andil	Dec-17	Andil	Dec-18	Andil
CABAI MERAH	0.20	TELUR AYAM RAS	0.10	BERAS	0.26	BERAS	0.14
BAWANG MERAH	0.16	CABAI RAWIT	0.06	TELUR AYAM RAS	0.11	TELUR AYAM RAS	0.11
TELUR AYAM RAS	0.11	BENSIN	0.02	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0.10	DAGING AYAM RAS	0.09
ROKOK KRETEK FILTER	0.07	BANDENG/BOLU	0.02	DAGING AYAM RAS	0.07	BAWANG MERAH	0.09
CABAI RAWIT	0.05	DAGING KAMBING	0.02	CABAI MERAH	0.03	MELON	0.02
ROKOK KRETEK	0.04	MELON	0.01	CABAI RAWIT	0.02	UPAH PEMBANTU RT	0.01
TARIP LISTRIK	0.04	MINYAK GORENG	0.01	MELON	0.02	BAYAM	0.01
GULA PASIR	0.04	ANGGUR	0.01	DOKTER UMUM	0.02	SEMEN	0.01
MELON	0.04	ROKOK KRETEK FILTER	0.01	KONTRAK RUMAH	0.02	KAYU BALOKAN	0.01
SEWA RUMAH	0.03	TARIP PULSA PONSEL	0.01	KANGKUNG	0.01	PISANG	0.01

Gambar 2. Komoditas penyumbang inflasi pada natal dan tahun baru

Data kemudian diolah menggunakan Microsoft excel, untuk menentukan frekuensi dan bobot sumbangan inflasi guna menentukan letak kuadran komoditas-komoditas penyumbang inflasi pada pada hari besar keagamaan tahun 2015-2018:



Gambar 3. Kuadran komoditas penyumbang inflasi pada Idul Fitri tahun 2015-2018



Gambar 4. Kuadran komoditas penyumbang inflasi pada Idul Fitri tahun 2015-2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penentuan letak komoditas penyumbang inflasi, maka prioritas perhatian dan solusi yang perlu dilakukan berfokus pada kuadran I, dimana komoditas Daging ayam dan Angkutan dalam kota memiliki frekuensi atau sering muncul dan andil yang lebih besar dari komoditas lainnya. Angkutan antar kota muncul sebanyak 4 (empat) kali, atau setiap pada hari raya idul fitri angkutan antar kota selalu muncul sebagai komoditas penyumbang inflasi, dengan rata-rata andil 0,13%, hal tersebut sama dengan komoditas daging ayam yang muncul setiap tahun pada hari raya idul fitri dengan bobot 0,12%. Sehingga 2 (dua) komoditas tersebut memvisualisasikan prioritas pengendalian inflasi yang harus dilakukan. Upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana angkutan antar kota dan komoditas daging

ayam dapat diturunkan andil sumbangan inflasinya, jika memungkinkan dapat dihilangkan sebagai komoditas penyumbang inflasi.

Setelah dilakukan pendalaman data dari 10 komoditas penyumbang inflasi dan sering muncul pada periode Natal dalam 4 tahun terakhir diperoleh Kuadran 1 dg komoditas 1) Telur Ayam Ras, 2) Beras, 3) Bawang Merah dan 4) Cabe Merah yang perlu diwaspadai. Selain itu pada Kuadran 4 dg komoditas 1) Melon, 2) Cabe Rawit, 3) Daging Ayam Ras dan 4) Rokok kretek filter juga menjadi prioritas selanjutnya untuk diwaspadai.

Dari kondisi tersebut mitigasi upaya yang dapat dilakukan TPID Kota Tegal dengan pendekatan 4K sebagai upaya tindak lanjut antara lain:

Rapat Koordinasi TPID dipimpin langsung oleh Walikota, Sekda fokus membahas 4 K pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang utama pembentukan inflasi di wilker;

Mendatangkan pakar dan narasumber yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan maupun memberikan solusi strategi yang akurat dalam pengendalian harga;

Dilakukan *perss conference* dalam rangka pelaksanaan komunikasi kebijakan yang efektif kepada masyarakat;

Rapat teknis TPID bersama peternak ayam petelur dan pedaging di sentra daging dan telur.

Mengumpulkan informasi siklus produksi, distribusi, permintaan dibandingkan dengan kondisi normal;

Koordinasi antar daerah dan kerjasama antar daerah baik Government to government, bisnis to bisnis sehingga pedagang beras, bawang merah, bawang putih, peternak ayam dan telur untuk memprioritaskan pemenuhan di Kota Tegal untuk membantu stabilitas harga, selain itu dapat menggerakkan Bulog dalam program stabilisasi harga sebagaimana penugasan yang diterima khususnya beras medium;

Sementara untuk angkutan kota, perlu koordinasi dengan organda untuk kebijakan yang dapat dipengaruhi di tingkat local, bukan oleh kementerian, maupun PT. Kereta Api Indonesia; dan

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil tersebut, diharapkan akan menurunkan bobot maupun frekwensi andil inflasi komoditas-komoditas yang ada di kuadran I sebagai prioritas jangka pendek maupun jangka Panjang yang harus dilakukan.

SIMPULAN

Dari analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa beras, bawang merah, cabe merah, transportasi antar kota dan daging ayam memiliki frekuensi sering muncul sebagai penyebab inflasi di kota Tegal tahun 2015 sampai tahun 2018. Selain itu, transport antar kota dan daging ayam juga memberikan andil inflasi yang cukup besar di setiap hari keagamaan idul fitri, natal dan tahun baru. Dengan langkah yang tepat, diharapkan dapat menurunkan andil inflasi dan frekwensi komoditas penyumbang inflasi pada hari raya keagamaan di Kota Tegal dengan menggunakan evaluasi kuadran inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nopirin.2009. Ekonomi Moneter. Buku II, Edisi ke 1, cetakan ketujuh. Yogyakarta: BPFE
- Suseno dan Astiyah, Siti. 2009.Inflasi. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia.
- Heryana, Ade. 2016. Pengertian dan Jenis-jenis penelitian. Diakses di http://adeheryana.weblog.esaunggul.ac.id/wpcontent/uploads/sites/5665/2016/04/Ade-Heryana_JENIS-PENELITIAN.pdf
- Mankiew, Gregory. 2012. Principles of Macroeconomic. South-Western Cengage Learning, USA.
- Ridwan, Masagus M, Werdaningtyas, Hesti & Grace, Melva Viva. 2013. Dinamika dan Heterogenitas Inflasi di Indonesia. Working Paper Bank Indonesia No.Wp/06/2013
- Fischer,S.1993. The Role of Macroeconomic Factors In Economic Growth. Journal of Monetary Economics. Vol.32.pp.485-512.

Utari, GA. Diah & Nurliana, Linda P.2012. Dampak Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Terhadap Inflasi. Catatan Riset DKM No.14/5/DKM/BRE/CR

Tjahjono, Endy D. Hutabarat, Akhis & Haryono,Erwin (2000). Pengukuran Inflasi Inti di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BEMP) Bank Indonesia edisi Maret 2000.

Vinayagathan, Thanabalasingam. 2013. Inflation and Economic Growth : A Dynamic Panel Threshold Analysis For Asian Economies, Journal Of Asian Economies Vol.26, Page 31-41.

www.bi.go.id

www.bps.go.id

www.tpin.go.id